

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 164 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 161 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIMARO KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kalimaro Kabupaten Cirebon.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2); dan
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIMARO KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kalimaro, yang selanjutnya disebut Puskesmas Kalimaro adalah UPTD Puskesmas Kalimaro.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM

tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat, dan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal kesehatan pada Puskesmas.

- (2) Standar Pelayanan Minimal kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Kalimaro, meliputi :

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pelayanan rekam medis;
- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan pemeriksaan umum;
- e. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- f. pelayanan kesehatan keluarga ibu dan anak/keluarga berencana;

- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan laboratorium; dan
- i. pelayanan gizi yang bersifat UKP.

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pelayanan kesehatan dasar, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency virus*);
- m. pelayanan imunisasi;
- n. pelayanan penyakit lainnya (kusta, Demam Berdarah *Dengue* (DBD), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)/pneumonia, diare, filariasis dan hepatitis);
- o. pelayanan promosi kesehatan;
- p. pelayanan kesehatan lingkungan;
- q. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan kerja;
- u. pelayanan kesehatan olah raga;
- v. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- w. pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya (surveilans).

Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada Puskesmas Kalimaro tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, standar nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Kalimaro, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 164 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 161 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIMARO KABUPATEN CIREBON.

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN
UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA UPTD PUSKESMAS KALIMARO**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUNAN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendaftaran	Jam buka pelayanan setiap hari kerja 07.30 WIB Lama waktu pelayanan pendaftaran ≤ 6 menit	80 %	79,67%	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	PJ UKP
		Kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur	100 %	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUNAN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kepuasan pelanggan	80 %	79 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	PJ UKP
9	Pelayanan Gizi yang bersifat UKP	Pemberi pelayanan gizi	Pendidikan D3 Gizi	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	PJ UKP
		Tersedia pelayanan konsultasi gizi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	PJ UKP

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 164 SERIE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 161 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIMARO KABUPATEN CIREBON.

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN
UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA UPTD PUSKESMAS KALIMARO**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	KONDISI AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	KONDISI AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	37%	70%	80%	90%	100%	100%	PJ UKM
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	100%	37%	70%	80%	90%	100%	100%	PJ UKM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	KONDISI AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Immunodeficiency virus (HIV)</i>									
13	Pelayanan Imunisasi	a. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) b. Persentase Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	93 % 93 %	93 % 93 %	93 % 93 %	93 % 93 %	93 % 93 %	93 % 93 %	93 % 93 %	PJ UKM PJ UKM
14	Pelayanan penyakit menular lainnya (Kusta, DBD, ISPA/Pneumonia, Diare, Filariasis dan Hepatitis)	a. Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) b. Persentase cakupan penemuan penderita pneumonia balita c. Persentase cakupan pelayanan diare pada kasus semua umur d. Persentase cakupan deteksi dini Hepatitis B pada Ibu Hamil	100 % 86 % 100 % 100 %	100% 86 % 82,97% 50 %	100% 86 % 100 % 100 %	PJ UKM PJ UKM PJ UKM PJ UKM				

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	KONDISI AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1			4	5	6	7	8	9	10	11
23	Pelayanan Kesehatan Indera	Cakupan Skrining Kelainan / gangguan refraksi pada anak sekolah	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	PJ UKM

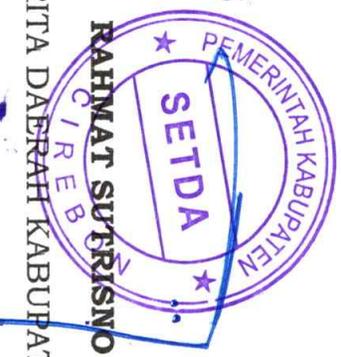
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 164 SERI E

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 161 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIMARO KABUPATEN CIREBON.

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

1. Pendaftaran

a. Jam buka pelayanan setiap hari kerja jam 07.30 WIB

Judul	Jam buka pelayanan setiap hari kerja jam 07.30 WIB
Dimensi Mutu	Akses dan informasi
Tujuan	Tersedianya Pelayanan pendaftaran pada hari kerja disetiap Puskesmas
Definisi Operasional	Jam buka pelayanan adalah jam dimulainya pelayanan pendaftaran oleh petugas. Jam buka pukul 07.30 setiap hari kerja
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah hari pelayanan pendaftaran yang buka sesuai ketentuan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah hari pelayanan pendaftaran dalam satu bulan
Sumber Data	Register pendaftaran
Target	80 %
Penanggung Jawab Pengumpul data	PJ UKP

b. Lama waktu pelayanan pendaftaran \leq 6 menit

Judul	Lama waktu pelayanan pendaftaran \leq 6 menit
Dimensi Mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya jenis loket pendaftaran pada hari kerja di Puskesmas

Definisi Operasional	Lama waktu pelayanan pendaftaran ≤ 6 menit adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh petugas pendaftaran dari pasien pendaftaran sampai pasien siap menuju di unit layanan yang dituju.
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pelayanan loket pendaftaran yang buka sesuai ketentuan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh hari pelayanan loket pendaftaran dalam satu bulan
Sumber Data	Register pendaftaran
Target	80 %
Penanggung Jawab Pengumpul data	PJ UKP

c. Kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

Judul	Kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektifitas
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan klinis sesuai standar/kebijakan yang berlaku
Definisi Operasional	Pemberian layanan klinis yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	Enam bulan sekali
Numerator	Jumlah langkah/prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Denominator	Jumlah langkah/prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sumber Data	Audit Klinis
Target	100 %

Penanggung Jawab Pengumpul data	PJ UKP
---------------------------------	--------

d. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan pendaftaran yang mampu memberikan kepuasan pelanggan
Definisi Operasional	Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, petugas loket, dan fasilitas pelayanan tindakan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien yang disurvei
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	80 %
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

2. Pelayanan Rekam Medis

a. Pemberi Pelayanan Rekam Medis

Judul	Pemberi Pelayanan Rekam Medis
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tersedianya tenaga yang kompeten dalam pelayanan rekam medis
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan rekam medis adalah tenaga yang mempunyai kompetensi sesuai yang dipersyaratkan untuk pelayanan rekam medis
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiga bulan sekali
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga rekam medis yang terlatih
Denominator	Jumlah seluruh tenaga rekam medis

Sumber Data	Unit rekam medis Puskesmas
Standar	Tersedia tenaga ahli rekam medis
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

b. Kelengkapan Rekam Medis selesai maksimal 7 jam

Judul	Kelengkapan Rekam Medis selesai maksimal 7 jam
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi Rekam Medis
Definisi Operasional	Rekam medis yang lengkap adalah Rekam Medis yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu ≤ 7 jam setelah selesai pelayanan pemeriksaan yang meliputi identitas pasien, anamnesa, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah Rekam Medis yang disurvei dalam 1 bulan yang diisi lengkap
Denominator	Jumlah Rekam Medis yang disurvei dalam 1 bulan
Sumber Data	Survei
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Petugas rekam medis

3. Pelayanan Gawat Darurat

a. Kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

Judul	Kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektifitas
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan gawat darurat sesuai standar/kebijakan yang berlaku

Definisi Operasional	Pemberian layanan klinis yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	Enam bulan sekali
Numerator	Jumlah langkah/prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Denominator	Jumlah langkah/prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sumber Data	Audit Klinis
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpul data	PJ UKP

b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan Bersertifikat yang Masih Berlaku

Judul	Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan Bersertifikat yang Masih Berlaku
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan gawat darurat oleh tenaga kompeten dalam bidang kegawatdaruratan
Definisi Operasional	Tenaga kompeten pada pelayanan gawat darurat adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan <i>Advanced Trauma Life Support (ATLS)</i> / <i>Basic Trauma Cardia Life Support (BTCLS)</i> / <i>Advanced Cardiac Life Support (ACLS)</i> / Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/ BTCLS/ ACLS/ PPGD
Denominator	Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan
Sumber Data	Kepegawaian
Target	100 %

Penanggung Jawab Pengumpul data	PJ UKP
---------------------------------	--------

c. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan gawat darurat yang mampu memberikan kepuasan pelanggan
Definisi Operasional	Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, petugas loket, dan fasilitas pelayanan tindakan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien yang disurvei
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	80 %
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

4. Pelayanan Pemeriksaan Umum

a. Jam Buka Pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00 WIB

Judul	Jam Buka Pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00 WIB
Dimensi Mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya jenis pelayanan rawat jalan pada hari kerja di Puskesmas
Definisi Operasional	Jam buka pelayanan adalah jam dimulainya pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medis jam buka 08.00 setiap hari kerja
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan

Numerator	Jumlah pelayanan pemeriksaan umum yang buka sesuai ketentuan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh hari pelayanan pemeriksaan umum dalam satu bulan
Sumber Data	Register pelayanan pemeriksaan umum
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpul data	PJ UKP

b. Kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

Judul	Kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan klinis sesuai standar/kebijakan yang berlaku
Definisi Operasional	Pemberian layanan klinis yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	Enam bulan sekali
Numerator	Jumlah langkah/prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Denominator	Jumlah langkah/prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sumber Data	Audit Klinis
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpul data	PJ UKP

c. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi Mutu	Kenyamanan dan efektifitas
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan yang mampu memberikan kepuasan pelanggan

Definisi Operasional	Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, petugas loket, dan fasilitas pelayanan pemeriksaan umum
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien pemeriksaan umum yang disurvei
Denominator	Jumlah seluruh pasien pemeriksaan umum yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	80 %
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut

a. Jam buka pelayanan setiap hari kerja jam 08.00 WIB

Judul	Jam buka pelayanan setiap hari kerja jam 08.00 WIB
Dimensi Mutu	Akses dan informasi
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Poliklinik pada hari kerja di setiap Puskesmas
Definisi Operasional	Jam buka pelayanan adalah jam dimulainya pelayanan poliklinik oleh tenaga dokter gigi dan terapis gigi. Jam buka antara pukul 08.00 WIB setiap hari kerja
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah hari pelayanan rawat jalan yang buka sesuai ketentuan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah hari pelayanan rawat jalan dalam satu bulan
Sumber Data	Register rawat jalan
Standar	80 %
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

b. Kepatuhan Petugas terhadap Standar Operasional Prosedur

Judul	Kepatuhan Petugas terhadap Standar Operasional Prosedur
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan klinis sesuai standar/kebijakan yang berlaku
Definisi Operasional	Pemberian layanan klinis yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	Enam bulan sekali
Numerator	Jumlah langkah/preosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Denominator	Jumlah langkah/prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sumber Data	Audit Klinis
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator UKP

c. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi Mutu	Kenyamanan dan efektifitas
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan gigi yang mampu memberikan kepuasan pelanggan
Definisi Operasional	Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, petugas loket, dan fasilitas pelayanan gigi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien ruang gigi yang disurvei
Denominator	Jumlah seluruh pasien ruang gigi yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	80 %

Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP
-----------------------------------	--------

6. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana

a. Jam buka pelayanan setiap hari kerja jam 08.00 WIB

Judul	Jam buka pelayanan setiap hari kerja jam 08.00 WIB
Dimensi Mutu	Akses dan informasi
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Poliklinik pada hari kerja di setiap Puskesmas
Definisi Operasional	Jam buka pelayanan adalah jam dimulainya pelayanan poliklinik oleh bidan. Jam buka antara pukul 08.00 setiap hari kerja
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah hari pelayanan rawat jalan yang buka sesuai ketentuan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah hari pelayanan rawat jalan dalam satu bulan
Sumber Data	Register rawat jalan
Standar	80 %
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

b. Kepatuhan Petugas terhadap Standar Operasional Prosedur

Judul	Kepatuhan Petugas terhadap Standar Operasional Prosedur
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan klinis sesuai standar/kebijakan yang berlaku
Definisi Operasional	Pemberian layanan klinis yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	Enam bulan sekali
Numerator	Jumlah langkah/prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Denominator	Jumlah langkah/prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sumber Data	Audit Klinis
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

c. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan KIA KB yang mampu memberikan kepuasan pelanggan
Definisi Operasional	Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, petugas loket, dan fasilitas pelayanan KIA KB
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien ruang KIA KB yang disurvei
Denominator	Jumlah seluruh pasien ruang KIA KB yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	80 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Tim Mutu

7. Pelayanan farmasi

a. Waktu Tunggu Pelayanan Obat non racikan \leq 10 menit

Judul	Waktu Tunggu Pelayanan Obat non racikan \leq 10 menit
Dimensi Mutu	Efektivitas dan efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan obat
Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat

Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei
Denominator	Jumlah pasien yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber Data	Survei
Standar	≤ 10 menit
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

b. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 15 menit

Judul	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan obat
Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan adalah obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat-obatan
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber Data	Survei
Target	≤ 15 menit
Penanggung Jawab Pengumpul data	PJ UKP

c. Kepatuhan Petugas terhadap Standar Operasional Prosedur

Judul	Kepatuhan Petugas terhadap Standar Operasional Prosedur
Dimensi Mutu	Kompetensi Teknis
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan klinis sesuai standar/kebijakan yang berlaku

Definisi Operasional	Pemberian layanan klinis yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	Enam bulan sekali
Numerator	Jumlah langkah/prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Denominator	Jumlah langkah/prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sumber Data	Audit Klinis
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpul data	PJ UKP

d. Kepuasan Pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan farmasi yang mampu memberikan kepuasan pelanggan
Definisi Operasional	Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, petugas loket, dan fasilitas pelayanan farmasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien Farmasi yang disurvei
Denominator	Jumlah seluruh pasien Farmasi yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	≥ 80 %
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

8. Pelayanan Laboratorium

a. Kepatuhan Petugas terhadap Standar Operasional Prosedur

Judul	Kepatuhan Petugas terhadap Standar Operasional Prosedur
Dimensi Mutu	Kompetensi Teknis
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan klinis sesuai standar/kebijakan yang berlaku
Definisi Operasional	Pemberian layanan klinis yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	Enam bulan sekali
Numerator	Jumlah langkah/prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Denominator	Jumlah langkah/prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sumber Data	Audit Klinis
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKP

b. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi Mutu	Kenyamanan
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan laboratorium yang mampu memberikan kepuasan pelanggan
Definisi Operasional	Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, petugas loket, dan fasilitas pelayanan laboratorium
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien Laboratorium yang disurvei
Denominator	Jumlah seluruh pasien Laboratorium yang disurvei

Sumber Data	Survei
Standar	≥ 80 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKP

9. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP

a. Pemberi Pelayanan Gizi

Judul	Pemberi Pelayanan Gizi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam menyediakan pelayanan gizi
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan gizi adalah tenaga terlatih gizi yang mempunyai kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pelayanan gizi di Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiga bulan sekali
Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga terlatih gizi yang memberi pelayanan gizi
Denominator	1
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	D3 Nutrisionis
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

b. Ketersediaan Pelayanan Konsultasi Gizi

Judul	Ketersediaan Pelayanan Konsultasi Gizi
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan konsultasi gizi
Definisi Operasional	Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi adalah tersedianya pelayanan bagi pasien dalam konsultasi gizi yang dibutuhkan
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiga bulan sekali
Periode Analisa	Tiga bulan sekali

Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang memberikan pelayanan gizi
Denominator	1
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	Tersedia tenaga dan pelayanan
Penanggung jawab pengumpulan data	PJ UKP

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 164 SERI E

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 161 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIMARO KABUPATEN CIREBON.

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Dimensi Mutu	Akses, keterjangkauan dan kesinambungan pelayanan
Tujuan	Menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah dan kemampuan manajemen kelangsungan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas. Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Satu kali pada trimester pertamab. Satu kali pada trimester keduac. Dua kali pada trimester ketiga <p>Standar kualitas adalah pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengukuran berat badan.b. Pengukuran tekanan darah.c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.

	<p>g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.</p> <p>h. Tes Laboratorium.</p> <p>i. Tata laksana/penanganan kasus.</p> <p>j. Temu wicara (konseling).</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja tertentu dalam 1 tahun
Sumber Data	Kohort Ibu dan Laporan bulanan KIA
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dimensi Mutu	Akses, keterjangkauan dan keselamatan
Tujuan	Supaya persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	<p>Persalinan di fasilitas kesehatan adalah ibu bersalin di fasilitas kesehatan sesuai dengan standar meliputi :</p> <p>a. Persalinan normal</p> <p>b. Persalinan komplikasi</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap Bulan
Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Kohort Ibu dan Laporan bulanan KIA
Standar	100 %

Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM
-----------------------------------	----------------------

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kesinambungan pelayanan
Tujuan	Mengetahui pelayanan Neonatal sesuai standar oleh tenaga kesehatan
Definisi Operasional	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Buku KIA
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengetahui pelayanan kesehatan balita sesuai standar oleh tenaga kesehatan
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan balita usia 0-59 Bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan sakit
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan

Numerator	Jumlah balita usia 12-23 bulan, 24-35 bulan dan 36-59 Bulan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar
Denominator	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan KIA
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dimensi Mutu	Kualitas dan keselamatan
Tujuan	Untuk meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat siswa kelas 1 s.d kelas 9
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setahun sekali
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama
Sumber Data	Catatan dan pelaporan hasil penjarangan kesehatan
Standar	Siswa SD
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dimensi Mutu	Kualitas dan keselamatan
Tujuan	Untuk meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat bagi usia 15-59 tahun
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi: Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang usia 15-59 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Catatan dan pelaporan hasil penjangkaran kesehatan
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Judul	Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dimensi Mutu	Kualitas dan Keselamatan
Tujuan	Setiap usia 60 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi: Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu hari
Periode Analisa	Satu Bulan

Numerator	Jumlah usia lanjut (≥ 60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran usia lanjut (≥ 60 tahun) di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan Bulanan Kesehatan Lansia
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dimensi Mutu	Kualitas dan Keselamatan
Tujuan	Setiap penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap Bulan
Numerator	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja puskesmas
Denominator	Jumlah sasaran penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan Bulanan Penyakit Tidak Menular (PTM)
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Judul	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar
Dimensi Mutu	Kualitas dan Keselamatan
Tujuan	Setiap penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun sesuai standar meliputi pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Hari
Periode Analisa	Setiap Bulan
Numerator	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja puskesmas
Denominator	Jumlah sasaran penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan Bulanan PTM
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

10. Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Dimensi Mutu	Kualitas dan Keselamatan
Tujuan	Setiap penderita Gangguan Jiwa Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi: pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Hari

Periode Analisa	Setiap Bulan
Numerator	Jumlah penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja puskesmas
Denominator	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

11. Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Judul	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Dimensi Mutu	Kualitas dan Keselamatan
Tujuan	Setiap penderita terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi: pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Hari
Periode Analisa	Setiap Bulan
Numerator	Jumlah penderita terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *Human Immunodeficiency virus* (HIV)

Judul	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Dimensi Mutu	Kualitas dan Keselamatan

Tujuan	Setiap orang risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang risiko terinfeksi HIV sesuai dengan standar meliputi: edukasi perilaku berisiko dan skrining
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Hari
Periode Analisa	Setiap Bulan
Numerator	Jumlah orang risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

13. Pelayanan Imunisasi

a. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Judul	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Menurunkan angka kesakitan, kematian serta kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Definisi Operasional	Cakupan IDL adalah Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kl, Polio 4 kl, DPTHB-Hib 3 kl, Campak 1 kl)
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	bayi 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kl, Polio 4 kl, DPTHB-Hib 3 kl, Campak 1 kl)
Denominator	Jumlah sasaran bayi 0-11 bulan yang di wilayah kerja

Sumber Data	Buku Kohort Bayi
Standar	93 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

b. Cakupan Desa /Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Judul	Cakupan Desa /Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Menurunkan angka kesakitan, kematian serta kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Definisi Operasional	Desa/Kelurahan dimana ≥ 80 % dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Desa/Kelurahan UCI di satu wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah seluruh Desa/Kelurahan di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan Imunisasi
Standar	93 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

14. Pelayanan Pencegahan dan pengendalian Penyakit

a. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Judul	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Agar KLB tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat
Definisi Operasional	Cakupan penanggulangan KLB Penyakit dan keracunan makanan yang dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan

Numerator	Jumlah KLB penyakit dan keracunan makanan yang ditanggulangi 1 x 24 jam
Denominator	Jumlah KLB penyakit dan keracunan makanan
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

b. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

Judul	Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Agar semua Kasus pneumonia di wilayah kerja puskesmas mendapatkan pelayanan di Fasilitas pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita adalah Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tata laksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja
Denominator	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	86 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

c. Cakupan pelayanan diare pada kasus semua umur

Judul	Cakupan pelayanan diare pada kasus semua umur
Dimensi Mutu	Kualitas

Tujuan	Agar semua Kasus Diare di wilayah kerja puskesmas mendapatkan pelayanan di Fasilitas pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Jumlah/angka penemuan kasus Diare pada semua umur yang mendapatkan pelayanan/ pengobatan di Fasilitas pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Penderita Diare Semua Umur dilayani
Denominator	Target Penemuan Penderita Diare Semua Umur
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

d. Cakupan deteksi dini Hepatitis B pada Ibu Hamil

Judul	Cakupan deteksi dini Hepatitis B pada Ibu Hamil
Dimensi Mutu	Keterjangkauan/Akses
Tujuan	Semua Ibu hamil di wilayah kerja puskesmas melakukan deteksi dini hepatitis B
Definisi Operasional	Ibu hamil yang melakukan deteksi dini hepatitis B di Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	jumlah ibu hamil yang melakukan deteksi dini hepatitis B
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

e. Angka Penemuan Kasus Baru/ *Case Detection Rate* (CDR)

Judul	Angka Penemuan Kasus Baru/ <i>Case Detection Rate</i> (CDR)
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Memutus tali rantai penularan kusta
Definisi Operasional	Jumlah kasus baru (kusta) yang ditemukan pada periode satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah kasus yang baru ditemukan pada periode satu tahun
Denominator	Jumlah Penduduk di wilayah kerja
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	$\leq 5 \%$
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

f. Pencegahan Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dengan penghitungan Angka Bebas Jentik (ABJ)

Judul	Pencegahan DBD dengan penghitungan Angka Bebas Jentik (ABJ)
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Mengetahui jumlah rumah yang terdapat jentik nyamuk
Definisi Operasional	Persentase rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah rumah dan tempat umum yang diperiksa jentik dan hasilnya negatif tidak ada jentik
Denominator	Jumlah rumah dan tempat tempat umum yang diperiksa jentik
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	95%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

15. Pelayanan Promosi Kesehatan

- a. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada: Keluarga, sekolah, tempat-tempat umum, fasilitas kesehatan.

Judul	Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada: keluarga, sekolah, tempat-tempat umum, fasilitas kesehatan
Dimensi Mutu	Informasi dan Kualitas
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan pada Keluarga, Sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Definisi Operasional	Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Keluarga, sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan adalah Kegiatan penyampaian informasi oleh petugas Puskesmas dengan sasaran Keluarga, sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan didukung alat bantu/media penyuluhan.
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Keluarga, sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan yang dilakukan penyuluhan dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah Keluarga, sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan Promosi Kesehatan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

- b. Penyuluhan kelompok oleh petugas kesehatan di dalam gedung Puskesmas

Judul	Penyuluhan kelompok oleh petugas kesehatan di dalam gedung Puskesmas
Dimensi Mutu	Informasi dan Kualitas

Tujuan	Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat di dalam gedung Puskesmas tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Definisi Operasional	Penyuluhan kelompok oleh petugas didalam gedung Puskesmas adalah penyampaian informasi kesehatan kepada sasaran pengunjung Puskesmas secara berkelompok (5-30 orang) yang dilaksanakan oleh petugas
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Penyuluhan kelompok oleh petugas di dalam gedung Puskesmas
Denominator	96 kali
Sumber Data	Laporan Bulanan Promosi Kesehatan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

c. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga

Judul	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditatanan rumah tangga
Dimensi Mutu	Informasi dan Kualitas
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan pada tatanan rumah tangga tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Definisi Operasional	pengkajian dan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan Rumah Tangga dengan melihat 10 indikator, meliputi : Linakes, memberi ASI Eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, menggunakan, air bersih, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik, makan sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik, tidak merokok di dalam rumah pada setiap rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas

Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah rumah tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di wilayah kerja puskesmas
Denominator	Seluruh rumah tangga yang ada di wilayah puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan Promosi kesehatan
Standar	70%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

- d. Cakupan Pembinaan Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dilihat melalui presentase (%) Posyandu strata Purnama dan Mandiri

Judul	Cakupan Pembinaan UKBM dilihat melalui presentase (%) Posyandu strata Purnama dan Mandiri
Dimensi Mutu	Informasi dan Kualitas
Tujuan	Agar semua Posyandu di wilayah kerja Puskesmas strata Purnama dan mandiri
Definisi Operasional	<p>Posyandu Purnama adalah Posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatannya utamanya lebih dari 50%, mempunyai kegiatan tambahan lebih dari 2 kegiatan, dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% kepala keluarga di wilayah kerja posyandu.</p> <p>Posyandu mandiri adalah posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mempunyai kegiatan tambahan lebih dari 2 kegiatan serta telah memperoleh sumber</p>

	pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% kepala keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu. Pembuktian dengan : data strata posyandu, SK Pokjantal Kecamatan, SK Pokja Desa/Kelurahan
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Posyandu strata Purnama dan Mandiri
Denominator	Seluruh Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan Promosi Kesehatan
Standar	40%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

a. Persentase Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)

Judul	Persentase Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)
Dimensi Mutu	Keterjangkauan/Akses
Tujuan	Meningkatkan akses sanitasi yang layak (jamban sehat) di wilayah kerja Puskesmas
Definisi Operasional	Persentase Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (Jamban Sehat) adalah perbandingan antara penduduk yang akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dengan penduduk seluruhnya
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	penduduk yang akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat)
Denominator	Jumlah Penduduk di wilayah kerja
Sumber Data	Laporan Bulanan Kesehatan Lingkungan
Standar	58,28%

Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM
-----------------------------------	----------------------

b. Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih

Judul	Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih
Dimensi Mutu	Keterjangkauan/Akses
Tujuan	Meningkatkan akses sanitasi yang layak terhadap air bersih di wilayah kerja Puskesmas
Definisi Operasional	kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehat pada Sarana Air Bersih.
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilaksanakan terhadap Sarana Air Bersih di Wilayah Puskemas pada periode tertentu
Denominator	Jumlah seluruh Sarana Air Bersih di wilayah Puskesmas dan pada periode yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan Kesehatan Lingkungan
Standar	85%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

17. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM

a. Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet

Judul	Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet
Dimensi Mutu	Keterjangkauan /Akses
Tujuan	Semua Ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet

Definisi Operasional	ibu hamil mendapat 90 TTD adalah jumlah ibu hamil yang selama kehamilan mendapat minimal 90 TTD
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah ibu hamil selama kehamilan yang mendapat minimal 90 TTD
Denominator	Jumlah ibu hamil yang ada
Sumber Data	Buku Kohort Ibu
Standar	98%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

b. Bayi umur 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Judul	Bayi umur 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Semua Bayi umur 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif
Definisi Operasional	Bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan adalah bayi sampai umur 6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral sejak lahir
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari mendapat ASI Eksklusif
Denominator	Jumlah bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari di wilayah kerja
Sumber Data	Buku Kohort Bayi
Standar	50%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

c. Balita yang Ditimbang berat badannya (D/S)

Judul	Balita yang Ditimbang berat badannya (D/S)
Dimensi Mutu	Keterjangkauan/Akses
Tujuan	Semua Balita yang berumur di bawah 5 tahun (0-59 bulan 29 hari) ditimbang di posyandu
Definisi Operasional	Persentase D/S adalah jumlah balita anak yang berumur di bawah 5 tahun (0-59 bulan 29 hari) yang ditimbang terhadap balita yang ada
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	jumlah balita yang berumur di bawah 5 tahun (0-59 bulan 29 hari) yang ditimbang
Denominator	Jumlah sasaran balita yang berumur di bawah 5 tahun (0-59 bulan 29 hari) yang di wilayah kerja
Sumber Data	Buku Kohort Bayi dan Balita
Standar	80%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

d. Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)

Judul	Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)
Dimensi Mutu	Keterjangkauan/Akses
Tujuan	Semua Remaja Putri (berusia 12 -18 tahun yang bersekolah di SMP/SMA atau sederajat) mendapat TTD secara rutin setiap minggu
Definisi Operasional	Persentase remaja putri (berusia 12 -18 tahun yang bersekolah di SMP/SMA atau sederajat) mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan

Numerator	Jumlah remaja putri (berusia 12 -18 tahun yang bersekolah di SMP/SMA atau sederajat) mendapat TTD
Denominator	Jumlah sasaran remaja putri (berusia 12 -18 tahun yang bersekolah di SMP/SMA atau sederajat) yang di wilayah kerja
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	30%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

e. Balita Wasting

Judul	Balita Wasting
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan status gizi
Definisi Operasional	persentase balita wasting adalah jumlah balita dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan Z-Score kurang dari -2SD
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah balita wasting
Denominator	Jumlah sasaran balita yang di wilayah kerja
Sumber Data	Laporan Bulanan Gizi
Standar	$\leq 5 \%$
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

f. Balita Stunting

Judul	Balita Stunting
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan status gizi
Definisi Operasional	persentase balita stunting adalah jumlah balita dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Tinggi Badan menurut umur (TB/U) dengan Z-Score kurang dari -2SD
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan

Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah balita stunting
Denominator	Jumlah sasaran balita yang di wilayah kerja
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	≤28 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

a. Cakupan keluarga risiko tinggi mendapat Asuhan keperawatan keluarga

Judul	Cakupan keluarga risiko tinggi mendapat Asuhan keperawatan keluarga
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan kemandirian keluarga untuk mengatasi masalah kesehatannya sehingga tercapainya derajat kesehatan yang optimal
Definisi Operasional	Jumlah keluarga yang mendapat asuhan keperawatan keluarga dan terdokumentasikan melalui askep keluarga sesuai dengan permasalahan yang ditemukan termasuk tindak lanjut permasalahan pada indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah keluarga yang mendapat Askep Keluarga di wilayah kerja puskesmas
Denominator	Jumlah sasaran keluarga yang bermasalah kesehatan dan tercatat dalam register R1 Perkesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	80%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

b. Cakupan masyarakat/Desa mendapat Asuhan keperawatan Komunitas

Judul	Cakupan masyarakat/Desa mendapat Asuhan keperawatan Komunitas
Dimensi Mutu	Keterjangkauan Akses dan Kualitas
Tujuan	Meningkatkan kemandirian masyarakat/desa untuk mengatasi masalah kesehatannya sehingga tercapainya derajat kesehatan yang optimal
Definisi Operasional	Jumlah desa/ kelurahan/RW yang mendapat asuhan keperawatan komunitas oleh perawat termasuk
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah desa atau RW atau RT atau kelurahan yang mendapat askep komunitas
Denominator	Jumlah desa atau RW atau RT atau kelurahan minimal 1 mendapat askep komunitas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

19. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

a) Pembinaan Kesehatan Gigi di Masyarakat

Judul	Pembinaan Kesehatan Gigi di Masyarakat
Dimensi Mutu	Kualitas dan keterjangkauan/Akses
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut
Definisi Operasional	Cakupan UKGM adalah persentase UKBM yang mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu setahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah UKBM yang mendapat pembinaan di wilayah kerja

Denominator	Jumlah UKBM yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	80%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

b) Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Siswa SD

Judul	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Siswa SD
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan siswa SD tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut
Definisi Operasional	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan mulut siswa SD adalah persentase siswa SD yang mendapat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dari petugas puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah siswa SD yang mendapat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah siswa SD yang berada di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	80%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

20. Pelayanan Upaya Kesehatan Kerja

Judul	Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas (minimal 1 Pos UKK)
Dimensi Mutu	Keterjangkauan akses dan Kualitas
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan kepada tenaga kerja (Pos UKK) tentang kesehatan kerja

Definisi Operasional	Jumlah Pos UKK yang terbentuk minimal 1 (satu) Puskesmas terbentuk 1 (satu) Pos UKK di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	1 (satu) pos UKK yang terbentuk yang ada di wilayah
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

a. Jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani

Judul	Jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan kebugaran calon jemaah haji
Definisi Operasional	Jemaah Haji yang diperiksa Kebugaran jasmani adalah Jumlah Jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani di wilayah kerja Puskesmas dibanding dengan jumlah Jemaah haji yang ada di wilayah kerja Puskesmas pada periode tertentu, dinyatakan dalam persentase
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Jemaah haji yang diukur kebugaran jasmani di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah Jemaah haji yang mengikuti kebugaran di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

b. Pengukuran kebugaran anak sekolah

Judul	Pengukuran kebugaran anak sekolah
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan kebugaran anak SD
Definisi Operasional	Persentase anak sekolah yang diperiksa kebugaran jasmani adalah jumlah anak sekolah yang diperiksa kebugaran jasmani di wilayah kerja puskesmas dibanding dengan jumlah anak sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas pada periode tertentu, di nyatakan dalam persentase
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Anak sekolah yang diukur kebugaran jasmani di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah anak sekolah yang mengikuti kebugaran di wilayah kerja Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

c. Orientasi tes kebugaran bagi guru olah raga

Judul	Orientasi tes kebugaran bagi guru olah raga
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan kebugaran bagi guru olah raga
Definisi Operasional	Jumlah guru olah raga yang mengikuti tes kebugaran dalam kurun waktu tertentu
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah guru olah raga yang mengikuti tes kebugaran dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah guru olah raga di wilayah Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	100%

Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM
-----------------------------------	----------------------

22. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Judul	Cakupan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penggunaan obat-obat tradisional
Definisi Operasional	Pembinaan penyehat tradisional adalah upaya yang dilakukan oleh puskesmas berupa inventarisir, identifikasi, dengan aplikasi Gan Hattra, pencatatan dan pelaporan kunjungan klien, serta fasilitasi rekomendasi registrasi kesehatan tradisional di wilayah kerja puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah Penyehat Tradisional seluruhnya di wilayah Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	13 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

23. Pelayanan Kesehatan Indera

Judul	Cakupan Skrining Kelainan/gangguan refraksi pada anak sekolah
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Mengetahui prevalensi kelainan refraksi mata
Definisi Operasional	Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kejadian gangguan ketajaman penglihatan yang lebih serius pada populasi risiko tinggi

Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Bulan
Periode Analisa	3 Bulan
Numerator	Jumlah anak sekolah yang diskruining Kelainan/gangguan refraksi oleh petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah anak sekolah seluruhnya di wilayah Puskesmas
Sumber Data	Laporan Bulanan
Standar	80%
Penanggung jawab pengumpulan data	Penanggung Jawab UKM

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 164 SERI E